



# Jalan Kampung Kotor dan Becek

■ Karut Marut Pengelolaan TPST Piyungan  
 ■ Jalur Pembuangan Sampah Diblokade

**BANTUL, TRIBUN** - Sudah tiga hari, sejak Sabtu (23/3) sore, proses buang dan bongkar sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan tersendat. Lokasi pembuangan sampah diblokade warga.

Mereka kecewa dan merasa dirugikan. Jalan kampung sebagai akses aktivitas warga kondisinya kotor dan becek. Apalagi saat musim hujan, sampah menimbulkan bau tidak sedap.

Warga meminta TPST Piyungan harus dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan antrean panjang. Ketika sedang padat, antrean dump truk yang mengangkut sampah bisa mengular sampai satu kilometer.

"Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas warga," tutur Maryono, Ketua Komunitas Pemulung Makaryo Adi Ngayogyakarta (Mardiko), yang didaulat rekan-rekannya untuk menjadi juru bicara warga.



*Kalau tuntutan warga terpenuhi, Truk sampah baru bisa masuk.*

**Maryono**  
Ketua Komunitas Pemulung Mardiko

TRIBUN JOGJA/AHMAD SYARIFUDIN

**DIPERMASALAHKAN** - Suasana TPST Piyungan, Bantul, yang sedang dipermasalahkan warga setempat, Minggu (25/3).

	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
• ke halaman 7	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui

## Jalan Kampung

• Sambungan Hal 1

Terlebih, kata Maryono, dump truk yang setiap hari lalu datang mengangkut sampah mengakibatkan jalan perkampungan rusak. "Kami minta jalan becek di-benahi. Dari bawah sampai atas," katanya.

Jalan bawah sampai atas yang dimaksud oleh Maryono adalah jalan kampung sepanjang satu kilometer lebih. Jalan tersebut, seperti kata Maryono, becek dan banyak berlubang. Bahkan kondisi di dalam TPST Piyungan, dekat dermaga pembuangan sampah, kondisinya dipenuhi lumpur dan sampah.

Maryono meminta jalan tersebut diberi penerangan lampu. Khusus jalan di dalam, dekat lokasi pembuangan sampah, diberi talut. Ia menyebutnya dengan istilah talutisasi. "Kalau nggak dit-alut limbah masuk ke pemukiman warga. Kami minta diperbaiki," ujarnya.

Dalam poin tuntutan, warga juga minta adanya dana kompensasi per kepala keluarga (KK). Sejak awal TPST Piyungan beroperasi, tidak ada dana kompensasi bagi warga terdampak.

Selain itu, untuk mengurangi antrian panjang, warga meminta kepada pengelola supaya dermaga pembong-

karan dilebarkan, sehingga proses bongkar sampah dari truk bisa lancar dan cepat.

"Kalau tuntutan warga terpenuhi. Truk sampah baru bisa masuk. Betul sedulur?," teriak Maryono, kepada sejumlah warga yang mengelilinginya. "Betuul," jawab mereka kompak.

Saat Maryono bersama warga menyampaikan tuntutan, kala itu hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Yoeke Indra Agung Laksana, dan Kepala Seksi pengelolaan sampah akhir Balai TPST Piyungan, Imam Sudiono.

Yoeke, siang itu, memang sengaja datang ke TPST Piyungan untuk mendengarkan duduk persoalan di lokasi pembuangan sampah yang dibangun sejak 1995. Menurut Yoeke, melihat dari persoalan yang ada, intinya kehidupan warga setempat terganggu. Karena bau sampah dan jalan umum untuk aktivitas warga banyak yang rusak. Bahkan, di beberapa bagian kondisinya becek.

"Dermaga pembuangan sampah sangat dekat dengan jalan. Sehingga kondisinya tidak layak sebagai jalan umum. Padahal di sana dilewati warga," ujar dia.

Yoeke menjelaskan, apa yang dikeluhkan warga nantinya akan coba dikomunikasikan kepada pemerintah.

Bahkan, dirinya berkomitmen siap mengawal untuk memperjuangkan solusi terbaiknya. Mengingat di lokasi itu, kata dia, sedikitnya ada 300 kepala keluarga yang terdampak langsung persoalan sampah.

"Sampah di dermaga nanti bisa ditengahkan sehingga tidak (menumpuk) di pinggir. Lokasi yang sudah ditengahkan, sampahnya bisa diurug supaya tidak bau. Sewa alat eskavator supaya bisa cepat," ujar dia, memberikan solusi prioritas.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Akhir Balai TPST Piyungan, Imam Sudiono, mendengarkan dengan seksama sejumlah tuntutan warga. Ia kini sedang menyiapkan lahan baru untuk menampung sampah. "Tapi perlu waktu," ujar Imam.

Tuntutan warga mengenai sampah teralut pinggir dan dermaga, akan dipenuhi, diperbaiki. Untuk jalan dari bawah (jalan masuk) sampai lokasi pembuangan, akan ada upaya pengaspalan. Namun, tidak semua diaspal. Hanya menambal yang berlubang saja. "Anggarannya cuma Rp500 juta."

### Sampah menumpuk

Imbas aksi warga yang memblokir TPST Piyungan mengakibatkan sampah di sejumlah pasar tradisional di Yogyakarta menumpuk. Hal itu disampaikan Kepala

Kebersihan Pasar Yogyakarta, Burnawan, kemarin.

"Sampah kami sudah banyak. Sudah menumpuk. Belum sampah buangan dari masyarakat, itu juga banyak," tuturnya.

Ia berharap hadirnya Ketua DPRD DIY, tuntutan warga bisa segera dipenuhi. Sehingga persoalan sampah bisa segera teratasi.

### Tunggu solusi

Pemkab Bantul menanti solusi Pemda DIY terkait TPST Piyungan. Pemkab Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyampaikan telah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Pemda DIY.

Pemkab Bantul tak dapat berbuat banyak terkait TPST Piyungan, karena pengelolannya di bawah DLH DIY.

Kepala DLH Bantul, Ari Budi Nugroho, mengatakan, khusus di Bantul, ia berharap masyarakat dapat mengurangi dan mengelola sampah untuk menghadapi situasi tersebut.

"Kalau terjadi masalah seperti ini kita pokoknya harus tetap mengedukasi masyarakat. Harus kurangi sampah dan mengelola sampah dengan baik," ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis, mengatakan, soal kemungkinan TPST baru, saat ini masih dilakukan kajian. (rif/amg)

# Tunggu Laporan Tim

**GUBERNUR** DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, masih menunggu laporan dari tim untuk menyelesaikan persoalan TPST Piyungan.

Jika sudah ada solusi, pihaknya pun akan menyelesaikan masalah tersebut. "Saya belum dapat laporan (soal TPST Piyungan). Sudah selesai atau belum, kalau sudah selesai kami selesaikan," ujar Sultan HB X usai rapat paripurna di

DPRD setempat, Senin (25/3). Sultan, menyebutkan, Pemda DIY sudah menurunkan tim untuk berkoordinasi dan mencari solusi atas persoalan di TPST Piyungan. "Sudah ada tim ke sana dan belum ada laporan ke kami," jelasnya.

Sementara itu, kalangan legislatif meminta persoalan TPST Piyungan Bantul segera diselesaikan secara tuntas. Ada beberapa alternatif penyelesaian yang ditawarkan agar TPST bisa berfungsi kembali

● ke halaman 7

## Tunggu Laporan

● Sambungan Hal 1

secara optimal tanpa mengganggu masyarakat sekitar.

Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana, mendorong pemerintah daerah setempat menyelesaikan persoalan tersebut dengan dua alternatif. Di antaranya adalah pembangunan jalan tembus atau jalan pintas untuk truk tanpa melalui jalan umum, dan menyewa alat untuk memindahkan sampah yang berceceran di jalan.

"Ini harus segera ditindaklanjuti dengan beberapa alternatif solusi. Pertama, saya akan komunikasikan dengan Pemda DIY untuk membangun jalan tembus atau *shortcut* agar truk bisa masuk membuang sampah tanpa melewati perkampungan," jelasnya, kemarin.

Dia menjelaskan, anggaran untuk pembangunan jalan tembus ini akan dikonsultasikan dengan Pemda DIY. Pemerintah, kata dia, bisa menganggarkan melalui anggaran yang tidak direncanakan semacam bansos untuk kegiatan.

Menurut Yoeke, dengan adanya jalan tembus ini, masyarakat di sekitar akan lebih nyaman menggunakan jalan perkampungan. Selain itu, mereka juga tidak terganggu dengan bau dan juga sampah yang dibawa menuju ke TPST Piyungan.

Dari pengamatan di lapangan, karena setiap harinya dilewati ratusan mobil dan truk pengangkut sampah, jalan tersebut menjadi rusak. Dia pun meminta Pemda Bantul bisa berkoordinasi dengan Pemda DIY untuk mengatasi hal ini.

"Saya tidak tahu apakah ini menjadi kebijakan dari Pemda Bantul, namun bisa berkoordinasi dengan Pemda DIY. Misalnya ada bantuan keuangan bersifat khusus," jelasnya.

Menurut Yoeke, dari beberapa kali berkomunikasi dengan Pemda DIY, memang sudah ada usulan untuk menganggarkan perbaikan jalan tersebut. Selama ini, perbaikan hanya berupa tambal sulam. Namun, untuk jangka panjang 2019 atau 2020 dimungkinkan bisa dibuat permanen.

Alternatif kedua, ujarnya,

kawasan tersebut membutuhkan peralatan untuk pengelolaan sampah. Sejauh ini, peralatan masih sangat kurang. Pihak pengelola sudah pesan alat baru namun baru mau dilihat.

"Kami usulkan agar ada sewa pihak swasta 1 bulan berupa satu atau dua alat untuk mempercepat pemindahan sampah dari pinggir jalan ke tengah," jelasnya.

### Mendesak

Persoalan sampah di kawasan ini mendesak untuk ditangani. Hal ini karena warga sekitar mengeluhkan banyaknya sampah yang berceceran di pinggir jalan. Jika hujan deras, air bercampur lumpur dan sampah akan turun mengotori lingkungan.

"Saya membayangkan kalau anak sekolah jatuh mengganti baju lagi karena kondisi ini. Ini harus segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Dari keterangan beberapa warga, mereka membutuhkan penerangan jalan selain infrastruktur yang memadai dan sehat. Sejumlah instansi pemerintah juga sudah meminta proses pembebasan sampah bisa segera dilakukakan kembali. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005